



**PENGARUH PDRB, UMR, DAN PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA  
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Maya Noviyanti**

**NIM. 130810101073**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PENGARUH PDRB, UMR, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2011-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Maya Noviyanti  
NIM. 130810101073**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibundaku Muryati tercinta, yang telah mendidik, membimbing, mendoakan, dan memberikan kasih sayang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta pengorbanan tanpa pamrih selama ini;
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan arahan dan dukungan serta seluruh keluarga besar, yang telah memberikan dukungan dan semangatnya;
3. Guru-guru SD hingga Perguruan Tinggi terhormat, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

Kegagalan terjadi bila kita menyerah.

(Lessing)

*Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow.*

(Albert Einstein)

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Hasil tak akan pernah mengkhianati proses.

(Hadi Ryanto)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Noviyanti

NIM :130810101073

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh PDRB, UMR, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Mei 2018

Yang menyatakan,

Maya Noviyanti

NIM 130810101073

**SKRIPSI**

**PENGARUH PDRB, UMR, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2011-2015**

Oleh:  
Maya Noviyanti  
NIM. 130810101073

Pembimbing  
Dosen Pembimbing I : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Dr. Lilis Yuliati, M.Si

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, UMR, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

Nama Mahasiswa : Maya Noviyanti

NIM : 130810101073

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi SDM

Tanggal Persetujuan : 4 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si

NIP. 19600412198702001

Dr. Lilis Yuliati, M.Si

NIP. 196907181995122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin M.Kes.

NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**PENGARUH PDRB, UMR, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2011-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Maya Noviyanti

NIM : 130810101073

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

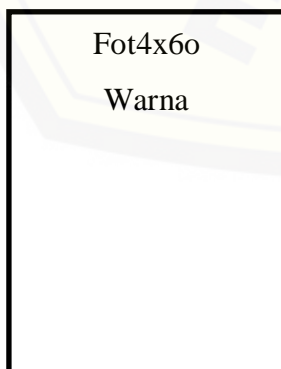
telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

14 September 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. P. Edi Suswandi, MP (.....)  
NIP. 195504251985031001
2. Sekretaris : Dr. Riniati, MP (.....)  
NIP. 196004301986032001
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindratin, M.Kes (.....)  
NIP. 196411081989022001



Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197107271995121001



***Pengaruh PDRB, UMR, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015***

Maya Noviyanti

*Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari masalah sosial berupa terbatasnya penyerapan tenaga kerja bagi jumlah angkatan kerja yang tersedia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis penyerapan tenaga kerja di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang diolah dengan metode regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Nilai *R-Square* menunjukkan 0.279208 yang berarti variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 27,92%, sementara sisanya 0,18% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada diluar model regresi.

**Kata Kunci:** penyerapan tenaga kerja, PDRB, UMR, pengeluaran pemerintah

***Determination of GDRB, UMR, and Government Expenditure toward  
Employment Opportunities in East Java Province Period 2011-2015***

Maya Noviyanti

*Departement of Economics and Development Study, the Faculty of Economics, the  
University of Jember*

**ABSTRACT**

*East Java Province is inseparable from social problems in the form of limited employment for the available workforce. The purpose of this study is to test and analyze the absorption of labor in 38 districts/cities in East Java Province in 2011 - 2015. The data used in this study are secondary data derived from the East Java Central Statistics Agency (BPS) processed with panel data regression method. The results of the analysis show that GDRB has a positive and significant effect on labor absorption, UMR has a positive and significant effect on employment, and government expenditure has a positive and significant effect on employment in East Java Province. The R-Square value shows 0.279208 which means that the dependent variable is labor absorption can be explained by the independent variable of 27.92%, while the remaining 0.18% can be explained by other variables that are outside the regression model.*

**Keywords:** *employment, GDRB, UMR, goverment expenditure*

## RINGKASAN

**Pengaruh PDRB, UMR, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015;** Maya Noviyanti, 130810101073; 2018: 97 halaman; Progam Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Tujuan dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010:11).

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia yang merupakan negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana

diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat poses pembangunan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengolahan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009). Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran.

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanti, 2009:1). Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passy dan Taufik, 1990).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara PDRB, UMR, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di

Jawa Timur. Dimana pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur berfluktuasi, akan tetapi di sisi lain kondisi ini justru tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun di satu sisi, produktivitas yang meningkat tiap tahunnya justru menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan kerja akan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dimana dari hasil penelitian yang diperoleh adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PDRB mengalami kenaikan maka akan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya.

Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila UMR mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Kemudian pengaruh Pengeluaran Pemerintah (G) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan suri tauladan yang telah diberikan kepada umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh PDRB, UMR, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi dapat terselesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

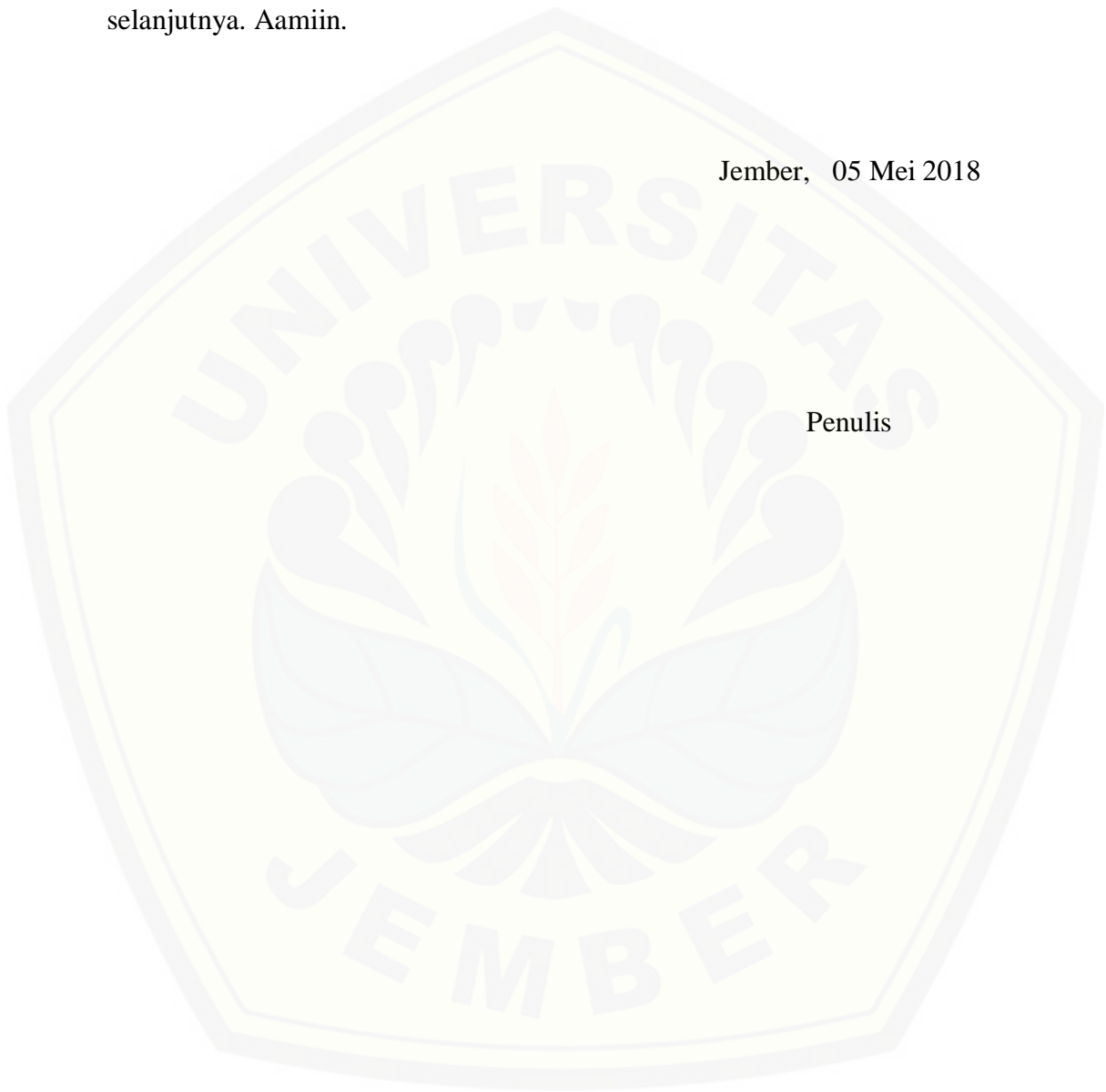
1. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran dengan penuh kesabaran selama penyelesaian skripsi ini, serta nasehat dan semangat yang dicurahkan untuk memotivasi penulis;
2. Ibu Dr. Lilis Yuliati, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr.Lilis Yuliati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Saya ucapkan terimakasih kepada Ibu atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu untuk membimbing saya;
4. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ibu Sebastiana Viphindartin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
6. Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Orang tuaku tercinta Ibunda Muryati yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara moral maupun material dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta pengorbanan tanpa pamrih demi kebahagiaan dan kesuksesan Ananda di masa depan;
9. Keluarga besarku tersayang yang selalu memberikan arahan dan dukungan secara moral maupun material dengan penuh keabaran serta seluruh keluarga besar, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
10. Sahabat-sahabatku Rika Puspitasari, Eka Rahmawati, Ayu Wiwin Rahayu, Kenit Ambar Ayu, Jessi Helda, Fisillia Satiti Universitasari, Elok Faiqotul Himmah yang selalu memberikan waktunya untuk berbagi tentang apapun, yang memberikan nasehat, motivasi, saran, dan kritik yang terkadang jujur banget, yang telah mengisi hari-hari dengan berbagai cerita dan warna yang akan selalu teringat;
11. Adik-adik terbaikku kosan Jalan Nias Raya No.6C (Ainur Rofi, Mirta Wahyu Pratiwi, dan Dika Huriatul), yang telah memberi rasa kebahagiaan, rasa kekeluargaan dan rasa persaudaraan saat bersama ataupun terpisah;
12. Teman-teman konsentrasi SDM 2013, yang telah berjuang bersama selama perkuliahan dengan penuh suka dan duka;
13. Teman-teman angkatan, kakak angkatan dan adik angkatan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta lintas jurusan yang telah berbagi pengetahuan dan informasi kepada penulis;
14. Teman-teman KKN 043 (Mbak Rani, Angel, Ainur, Lilis, Sandy, Figi, Aris, Zainul, Rildo) Universitas Jember Gelombang I tahun akademik 2016/2017 yang telah memberikan kesan selama 46 hari hidup bersama di Desa Awar-awar Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
15. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Aamiin.

Jember, 05 Mei 2018

Penulis



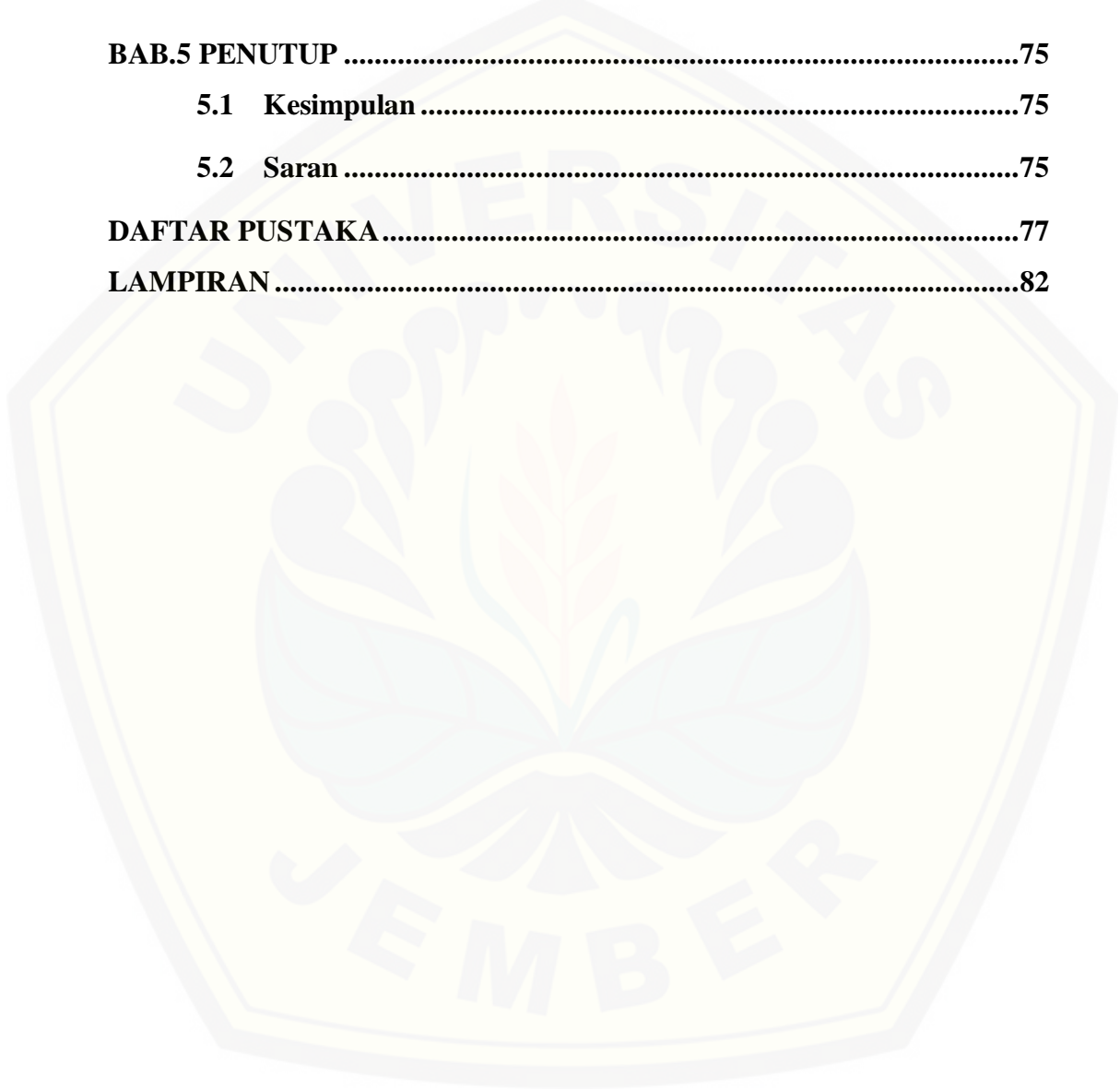


DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja .....	<b>11</b>
2.1.2 Teori Permintaan Tenaga Kerja.....	<b>13</b>
2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja.....	<b>18</b>

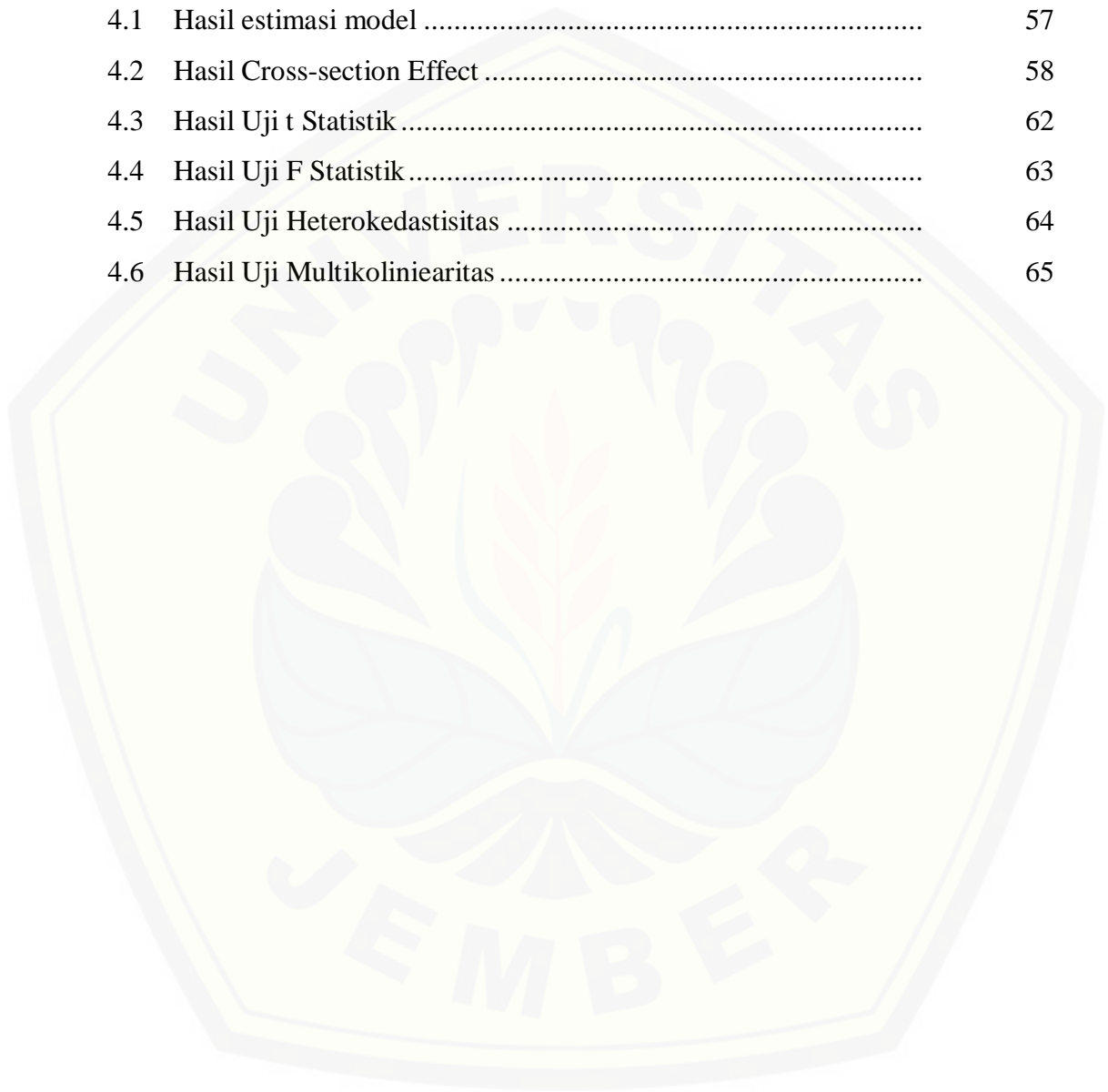
2.1.4	Penawaran Tenaga Kerja.....	18
2.1.5	Pasar Tenaga Kerja .....	20
2.1.6	Pengeluaran Pemerintah .....	21
2.1.7	Teori Upah.....	23
2.1.8	Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.1.9	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	30
<b>2.2</b>	<b>Pengaruh Antar Variabel.....</b>	<b>30</b>
2.2.1	Pengaruh PDRB Terhadap Peyerapan Tenaga Kerja.....	30
2.2.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	32
2.2.3	Pengaruh UMR Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	33
<b>2.3</b>	<b>Penelitian Sebelumnya.....</b>	<b>37</b>
<b>2.4</b>	<b>Kerangka Konseptual.....</b>	<b>43</b>
<b>2.5</b>	<b>Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>3.1</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>3.2</b>	<b>Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3</b>	<b>Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>46</b>
<b>3.4</b>	<b>Metode Analisis Data .....</b>	<b>47</b>
<b>3.5</b>	<b>Metode Analisis Regresi Data Panel .....</b>	<b>47</b>
3.5.1	Uji Spesifikasi Model.....	48
3.5.2	Uji Statistik .....	49
<b>3.6</b>	<b>Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>52</b>
<b>3.7</b>	<b>Definisi Operasional .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum.....</b>	<b>55</b>

4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur .....	55
<b>4.2</b>	<b>Hasil Penelitian .....</b>	<b>58</b>
4.2.1	Analisis Data.....	58
4.2.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
<b>BAB.5</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1	Kesimpulan .....	75
5.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>82</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	40
4.1 Hasil estimasi model .....	57
4.2 Hasil Cross-section Effect .....	58
4.3 Hasil Uji t Statistik .....	62
4.4 Hasil Uji F Statistik .....	63
4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	64
4.6 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65



**DAFTAR GAMBAR**

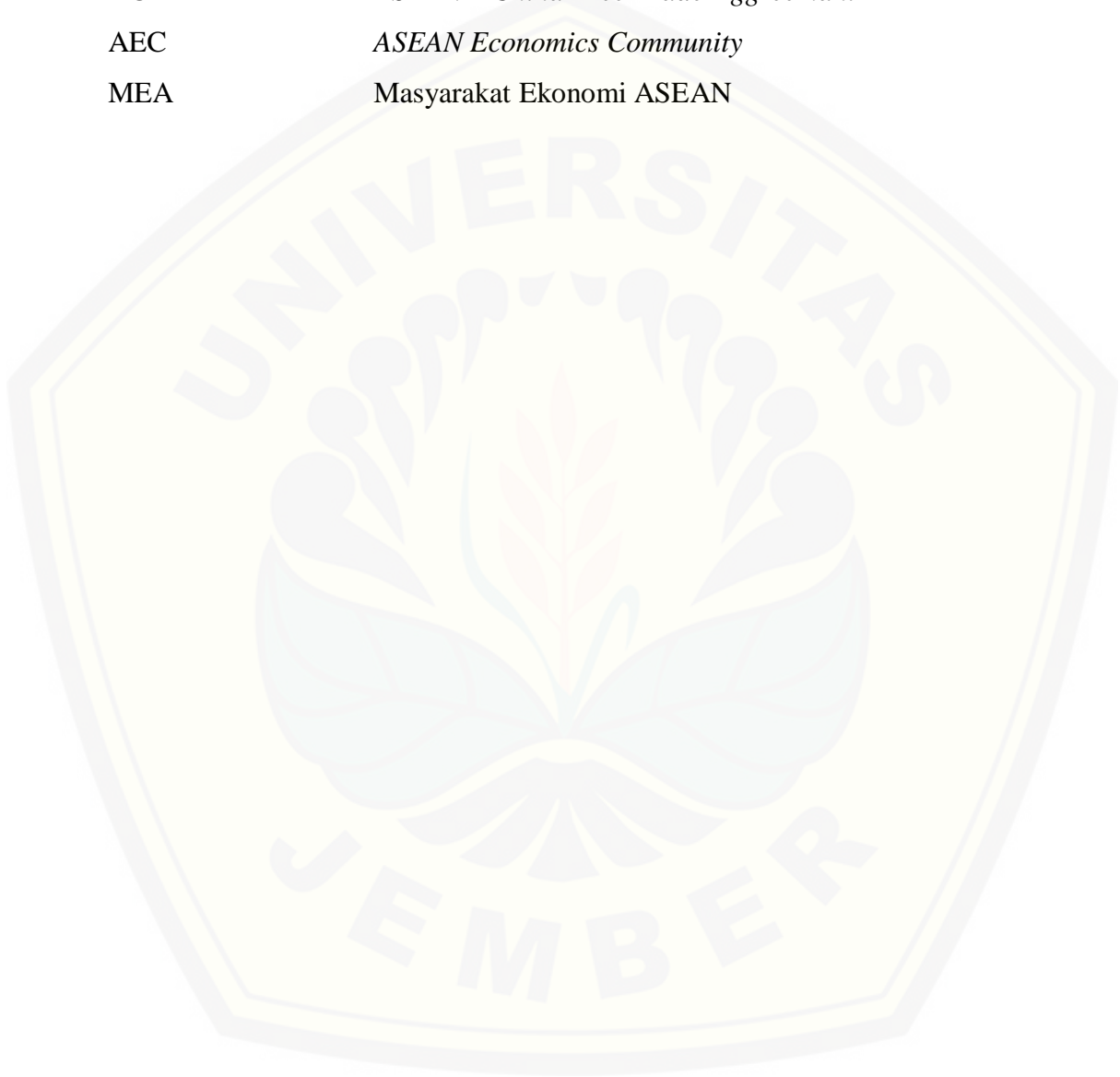
	Halaman
2.1 Diagram Ketenagakerjaan .....	9
2.2 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Tetap .....	16
2.3 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Menurun .....	17
2.4 Fungsi Penawaran Tenaga Kerja .....	19
2.5 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja.....	37
2.6 Kerangka Konseptual.....	44
4.1 Peta Provinsi Jawa Timur .....	56
4.2 Hasil Uji Normalitas .....	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A Data Penyerapan Tenaga Kerja, PDERB, UMR, Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun Tahun 2011 – 2015.....	83
B Log Data Panel.....	88
C Uji Hausman .....	92
D Hasil Estimasi <i>Panel Data Fixed Effect Model (FEM)</i> .....	93
E Uji Cross-section Effect.....	94
F Uji Multikolienearitas.....	95
G Uji Heterokedatisitas .....	96
H Uji Normalitas.....	97

**DAFTAR ISTILAH**

PDRB	<i>Produk Dosmetik Regional Bruto</i>
ASEAN	<i>Assosiation of Southeast Asian Nation</i>
ACFTA	<i>ASEAN – China Free Trade Aggreemant</i>
AEC	<i>ASEAN Economics Community</i>
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Tujuan dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010:11).

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia yang merupakan negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Sumber daya



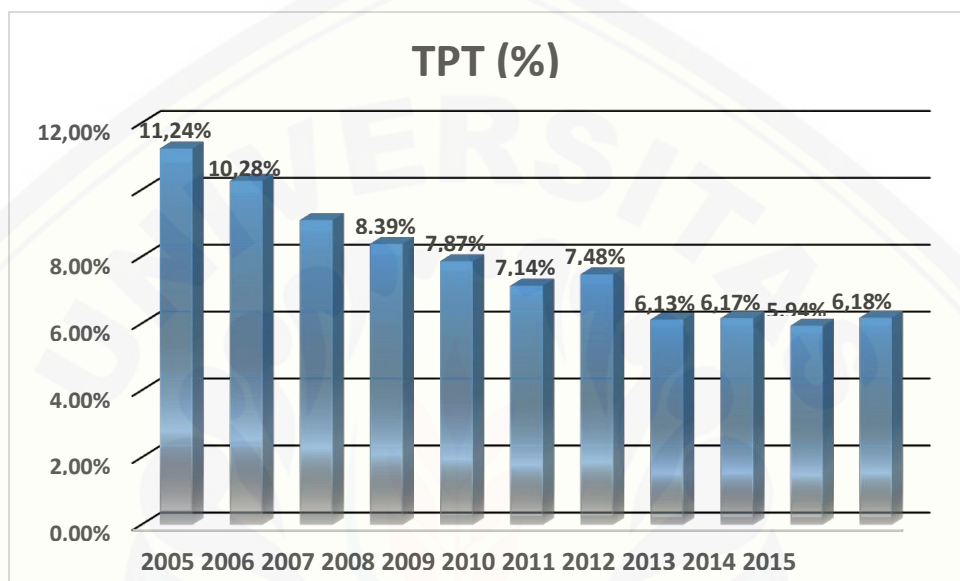
manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengolahan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009). Ketidakmampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran.

Tingkat pengangguran di Indonesia sejak tahun 20025 hingga tahun 2010 terus mengalami penurunan. Namun tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,34% dari tahun 2010 menjadi 7,84%. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,35% dari tahun 2011 menjadi 6,13%. Namun meningkat lagi sebesar 0,4% di tahun 2013 menjadi 6,17%. Setelah itu terjadi penurunan di tahun 2014 sebesar 0,23% dari tahun 2013 menjadi 5,94%. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 0,24% menjadi 6,18%. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada

tahun 2005 yaitu 11,24% dan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 5,94%. Tingkat pengangguran di Indonesia telah menunjukkan hal yang positif dimana setiap tahun terus mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan keseriusan dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran di Indonesia.



Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2005-2015

(Sumber: BPS diolah)

Jika dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari situasi yang di dalamnya telah terjadi ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, bahkan terus bertambah, antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah mencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamana yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan

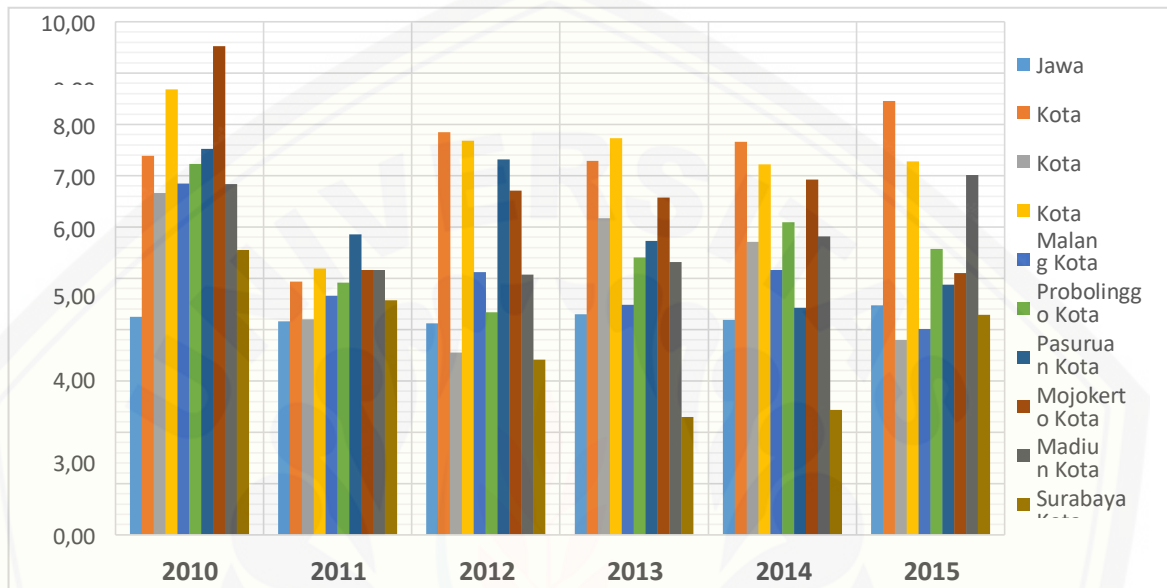
saling berkaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Jamaludin, 2015).

Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam pembangunan di Jawa Timur. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pengangguran, diperlukan indikator-indikator sebagai dasar perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program. Informasi tersebut akan banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bada Pusat Statistik, 2015).

Pada Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dan kota-kota di Provinsi Jawa Timur. Penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015 tidak diikuti oleh beberapa Kota di Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010, terjadi di Kota Malang dan Kota Madiun, namun pada tahun 2015 tingkat pengangguran tinggi terjadi hanya di Kota Kediri dan Kota Malang. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Indonesia Provinsi Jawa Timur lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, kota-kotanya termasuk yang tertinggi diantaranya Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur mengalami fluktuatif dari tahun 2010-2015. Tiga Kota (Kediri, Malang, dan Surabaya) dari sembilan Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2015. Sedangkan Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Batu cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan Gambar 1.2 dibawah, tingkat pengangguran Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar 8,46%, meningkat dari tahun 2013 dengan nilai 7,66%. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran di Kota Malang sebesar 7,28%, padahal tahun 2014 hanya sebesar 7,22%. Peningkatan pengangguran juga terjadi di Kota Surabaya, pada tahun 2014

sebesar 5,82% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,01%. Pengangguran tertinggi pada tahun 2015 di kota-kota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Kediri. Tentu pola ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (dalam %)

(Sumber: BPS Jawa Timur, Sakernas 2010.2015)

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, sehingga tidak ada pengangguran. Namun hingga tahun 2015, kondisi normal yang diharapkan tersebut belum dapat tercapai. Jumlah pengangguran tiap tahunnya bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, namun mencakup karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Antara lain perubahan struktur umur penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka bebas ketergantungan, distribusi

tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standar upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah faktor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang memadai. Semetara dari sisi persediaan juga memperlihatkan masih rendahnya kualitas pendidikan penduduk usia kerja sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai, serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori kerja.

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Fenomena tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Selain nilai PDRB suatu wilayah, tingkat Upah Minimum Kota (UMK) juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja yang berupa jumlah yang dibayarkan kepada pekerja. Jika dilihat dari pemberi pekerjaan upah adalah beban perusahaan dimana penambahan upah minimum dapat menyebabkan pengangguran dalam permintaan tenaga kerja. Menurut Mankiw (2000) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran. Sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah imbalan yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga kerja yang digunakan, akibat penambahan upah minimum dapat ditarik angkatan kerja untuk mau bekerja dan mencari pekerjaan.

Bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diwarnai dengan munculnya masalah-masalah akibat kehidupan penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di beberapa sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan misalnya permasalahan yang umum terjadi di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan oleh banyak pakar mengenai studi kota, bahwa penduduk akan bertempat tinggal di kota dan kawasan sekitar kota. Menurut Mulyadi (2003), jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula, ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka setidaknya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka, ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja.

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanti, 2009:1). Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passy dan Taufik, 1990).

Ketenagakerjaan masih terlihat pada salah satu prioritas perhatian pemerintah, hal ini dapat terlihat pada ketenagakerjaan yang merupakan salah satu sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, sesuai *triple track strategy (pro poor, pro growth, pro job)*. Begitu pula pada RPJM 2010-2014, sasaran tingkat pemerintah pada bidang ketenagakerjaan adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5-6 %

dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan seperti terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, kualitas angkatan kerja yang rendah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda yang tinggi dan TPT terdidik (di atas SLTA) masih tinggi.

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping sumber daya lainnya, dan dapat memengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar tenaga kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*enemployment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan memontum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, maka salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penganggulan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Jawa Timur adalah pengangguran, yang anatara lain disebabkan tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya

kualitas angkatan kerja, kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Sedangkan disisi penawaran Dari sisi penawaran, perekonomian Jawa Timur didorong oleh peningkatan kinerja di lapangan usaha industri pengolahan. Peningkatan kinerja lapangan usaha tersebut di triwulan ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi, serta peningkatan permintaan dari luar daerah yang diindikasikan dengan peningkatan net ekspor DN. Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jawa Timur, juga turut berpengaruh oleh kondisi tersebut.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur perlu didorong agar lebih berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas bagi kelompok setengah menganggur (*under employment*). Penguatan ekonomi di Jawa Timur perlu dibangun dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi, infrastruktur, serta pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan dan masyarakat kelas menengah. Penyerapan tenaga kerja terbanyak hingga saat ini masih ada pada sektor primer yaitu pertanian yang tingkat produktivitasnya cenderung rendah.

Namun mulai terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja ke sektor sekunder dengan tingkat produktivitasnya yang lebih tinggi. Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah bahwa pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder mengakibatkan perlunya tenaga kerja yang kompeten dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di sektor sekunder yang umumnya mensyaratkan keahlian tenaga kerja dalam tingkatan yang relatif tinggi.

Untuk kondisi Jawa Timur, pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan sekaligus pemberdayaan masyarakat kelas menengah menjadi potensi yang menjanjikan. Sektor ekonomi kerakyatan terbukti kuat, tahan krisis dan menjadi



penggerak pasar domestik. Sedangkan kelas menengah diberdayakan karena kelompok ini memiliki dasar pendidikan, produktivitas relatif tinggi, dan menghasilkan pencari kerja muda berpendidikan relatif tinggi. Kelas menengah ini bagi Jawa Timur merupakan dampak dari bonus demografi yang harus dikelola secara baik sehingga menjadi pendorong produktivitas dan bukan menjadi beban ekonomi masyarakat.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk bukan usia produktif harus diciptakan berkualitas unggul sehingga mampu mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi. Untuk itu, daya dukung pengembangan SDM tidak dapat ditawar lagi menjadi salah satu pilar strategis. Terlebih dikaitkan dengan penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina atau ACFTA (*ASEAN - China FreeTrade Agreement*), dan yang terdekat adalah AEC (*ASEAN Economic Community*) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang berlaku pada Desember 2015. Perjanjian ini mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan profesional (*free flow of skilled labor*). Karenanya, harus ditempuh berbagai upaya peningkatan taraf kompetensi tenaga kerja di Jawa Timur.

Berbicara mengenai kuantitas penduduk, jumlah penduduk Jawa Timur menunjukkan perkembangan relatif terkendali, namun tingkat kepadatannya semakin jauh melewati angka kepadatan penduduk ideal di Jawa Timur yakni  $\pm 700$  jiwa/km<sup>2</sup>. BPS Provinsi Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama 10 tahun terakhir sebesar 0,75%. Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Merujuk kepada konsep demografi, penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya.

Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur yang semakin jauh melampaui batas, maka timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi juga sangat relevan dengan kebijakan kependudukan lainnya berupa kebijakan pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Menurut Todaro (2006) salah satu implikasi yang menonjol atas tingginya angka kelahiran di negara berkembang adalah hampir 40% penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Jadi angkatan kerja produktif di negara-negara berkembang harus menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-anak yang proporsional jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ada di negara-negara maju. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan (*dependency burden*). Artinya, mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif sehingga menjadi beban angkatan kerja yang produktif (berumur 15-64 tahun). Menurut Asyad (2010), semakin tinggi presentase rasio beban tanggungan, semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan rasio beban tanggungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berfluktuasi, akan tetapi di sisi lain kondisi ini justru tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun di satu sisi, produktivitas yang meningkat tiap tahunnya justru menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan kerja akan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin bertambah.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh.

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut dibutuhkan kajian mengenai ketenagakerjaan yaitu penyerapan tenaga kerja beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Maka, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?
- 2) Bagaimana pengaruh UMR terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?
- 3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
- 2) Mengetahui pengaruh UMR terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
- 3) Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

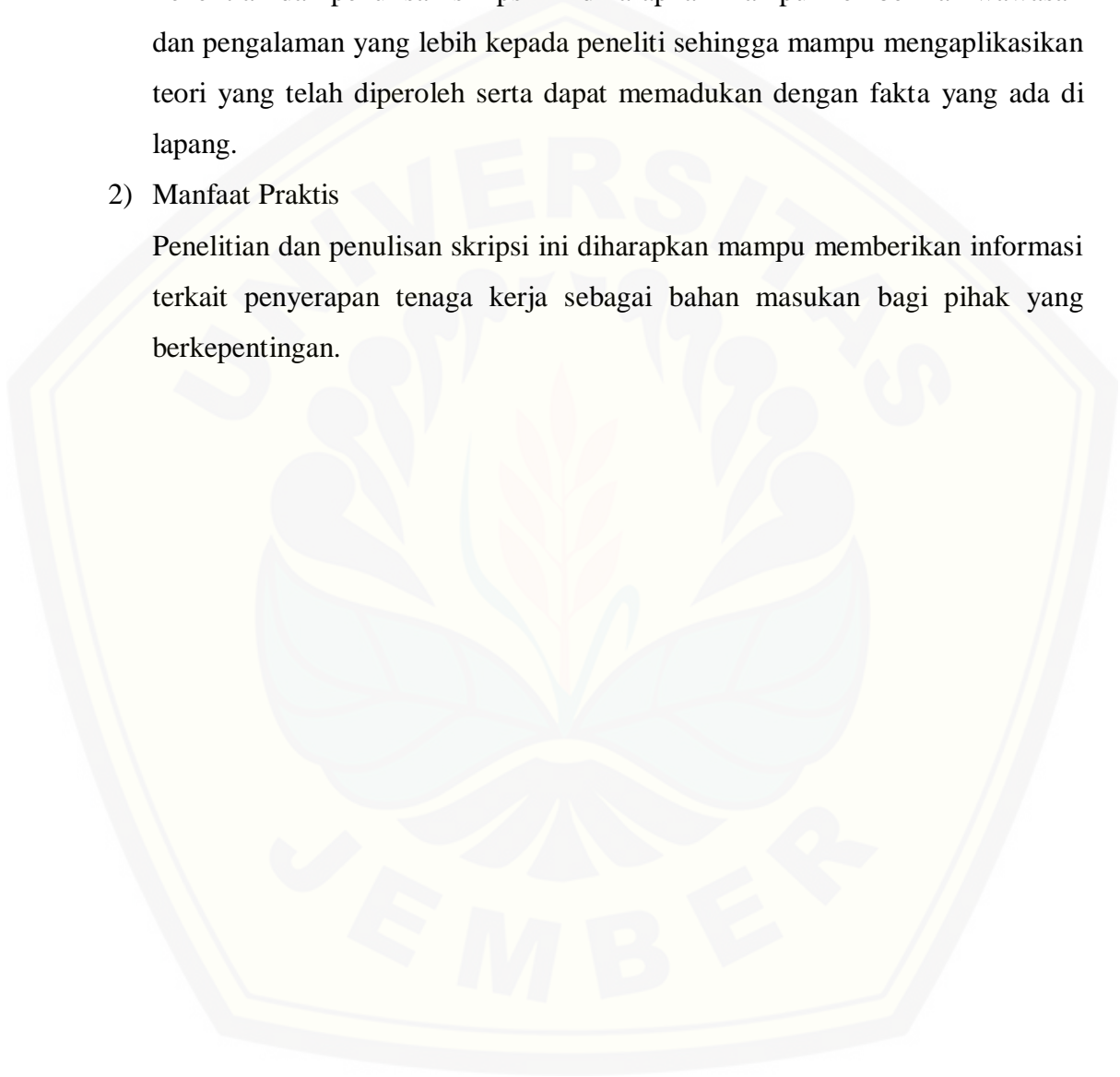
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait diantaranya sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih kepada peneliti sehingga mampu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh serta dapat memadukan dengan fakta yang ada di lapang.

2) Manfaat Praktis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait penyerapan tenaga kerja sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menganalisis PDRB, UMR, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

### 2.1 Landasan Teori

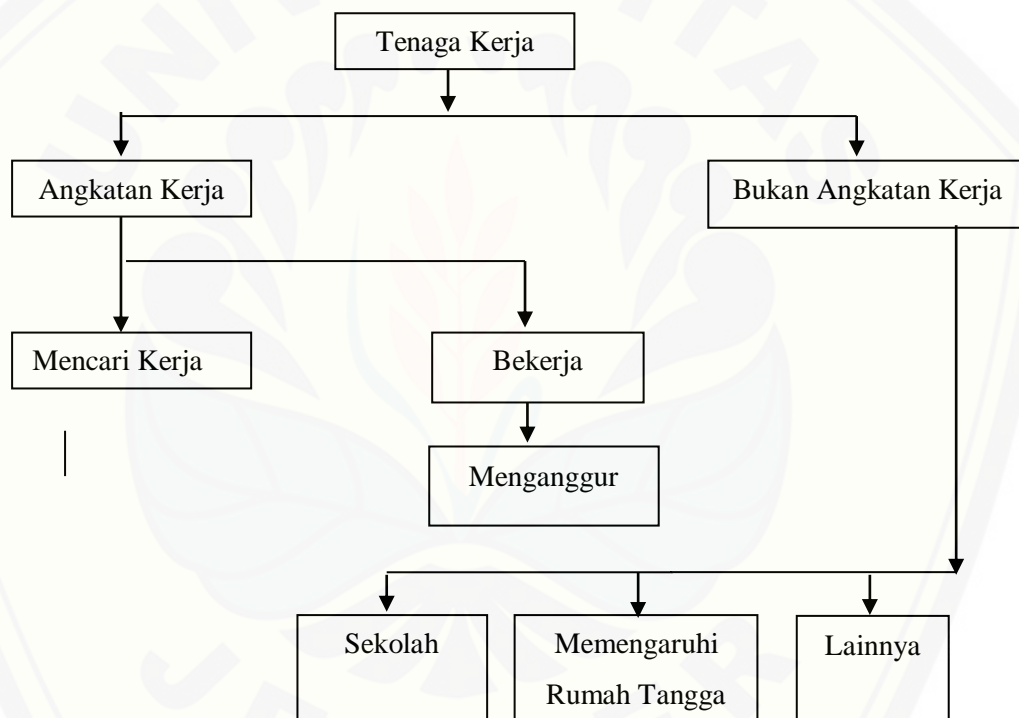
#### 2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) atau *human resources* mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja dan kelompok penduduk dalam usia kerja (*working-age population*) tersebut dinamakan tenaga kerja atau *man power*. Pengertian tersebut mengandung aspek kualitas dalam arti SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi.

Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Menurut BPS (2000), bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam secara terus-menerus selama seminggu yang lalu. Sementara yang dimaksud dengan mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah bekerja dan penduduk yang belum bekerja.

Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi digolongkan dalam kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri dari kelompok mereka yang bersekolah,

kelompok yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang menurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lainnya (DEPNAKERTRANS, 2007). Golongan yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar tenaga kerja sehingga kelompok ini dapat disebut juga sebagai angkatan kerja potensial. Sektor formal didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki badan usaha dengan memiliki tenaga kerja, sedangkan sektor informal adalah usaha yang dilakukan sendiri atau dibantu orang lain dan atau pekerja bebas serta pekerja yang tak dibayar. Penggolongan semua penduduk tersebut dapat dilihat pada diagram ketenagakerjaan.



Gambar 2.1 Diagram Ketenagakerjaan (Sumber: DEPNAKERTRANS, 2007)

Menurut Sawastha (2000) dalam Subekti (2007) tenaga kerja dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu:

- 1) Tenaga Kerja Eksekutif. Tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen,

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinir dan mengawasi.

- 2) Tenaga Kerja Operatif. Jenis tenaga kerja ini adalah pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan kepadanya. Tenaga kerja opertaif dibagi menjadi tiga yaitu:
  - a. Tenaga kerja terampil (*skilled labavour*)
  - b. Tenaga kerja setengah terampil (*semi skilled labavour*)
  - c. Tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labavour*)

### 2.1.2 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan.

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atas instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Arfida BR, 2003). Permintaan tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat upah.

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang dan jasa karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena untuk membantu memproduksi barang/jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan

permintaan konsumen akan barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand* (Simanjuntak, 2001).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

a. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan memengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut, naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang., yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksi dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif.



b. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumsi

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

c. Harga barang modal turun

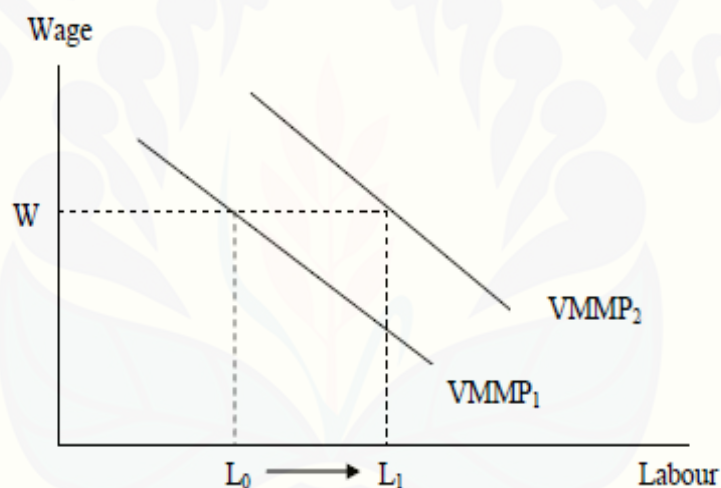
Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi dari suatu unit usaha, yang tercermin dari besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal seperti mesin atau alat proses produksi (Subekti, 2007).

Mengacu pada uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh sektor usaha tertentu disuatu wilayah. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di Jawa Timur.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat memengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal ini memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada: (1) tambahan hasil marginal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut *Marginal Physical Product* dari

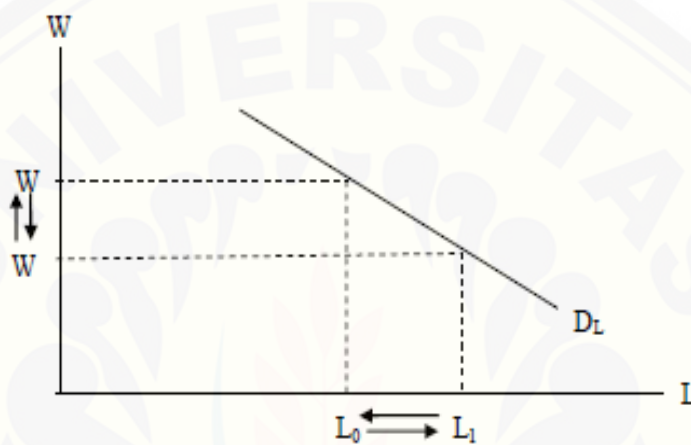
tenaga kerja (MPPL), (2) penerimaan marginal, yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marginal tersebut atau istilah lainnya disebut *Marginal Revenue* (MR). Penerimaan marginal disini merupakan besarnya tambahan hasil marginal dikalikan dengan harga per unit, sehingga  $MR = VMPP = MPPL \cdot P$  .dan (3) biaya marginal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marginal lebih besar dari biaya marginal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama *Marginal Revenue* (MR) lebih besar dari tingkat upah.



Gambar 2.2 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Tetap  
(Sumber: Bellante and Jackson, 1990)

*Value Marginal Physical Product of Labour* (VMPP) adalah nilai pertambahan hasil marginal dari tenaga kerja.  $P$  adalah harga jual barang per unit,  $DL$  adalah permintaan tenaga kerja,  $W$  adalah tingkat upah, dan  $L$  adalah jumlah tenaga kerja. Peningkatan permintaan tenaga kerja terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsinya. Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap (Gambar 2.2).

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan mekanisme, sedangkan dalam jangka panjang jumlah permintaan akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru.



Gambar 2.3 Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Menurun  
(Sumber: Bellante and Jackson, 1990)

Pengusaha akan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja tergantung dari tingkat upahnya. Jika tingkat upah mengalami penurunan, maka pengusaha akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan tingkat upah dapat dilihat pada Gambar 2.3. Kurva DL melukiskan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja (VMPPL) untuk setiap penggunaan tenaga kerja. Dengan kata lain, menggambarkan hubungan antara tingkat upah ( $W$ ) dan penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh titik  $L_1$  dan  $L$ . Pada gambar 2.3 terlihat bahwa pada kondisi awal tingkat upah berada pada  $W_1$  dan jumlah tenaga kerja yang digunakan  $L_1$ . Jika tingkat upah diturunkan menjadi  $W$ , maka tenaga kerja yang diminta meningkat menjadi  $L$ .

### 2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah barang tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditunjukkan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Sukirno, 2004).

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang mempekerjakan banyak orang yang umumnya menghasilkan barang atau jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda, demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam penyerapan tenaga kerja.

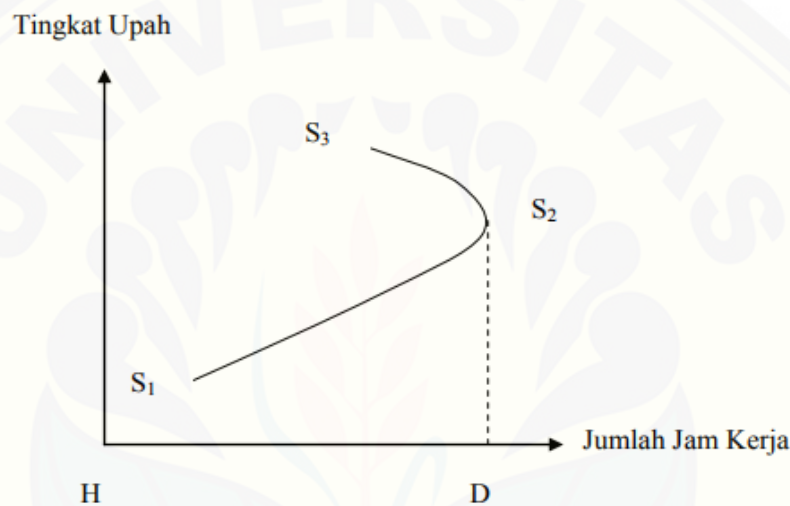
### 2.1.4 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkan. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Menurut G.S Becker (1997), kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau

tidak. Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya santai (tidak produktif tetapi konsumtif), atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula dengan tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya, apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang alokasikan untuk bekerja (Sumarsono, 2003).



Gambar 2.4 Fungsi Penawaran Tenaga Kerja  
(Sumber: Simanjuntak, 2001)

Sampai dengan jumlah jumlah jam kerja  $HD$ , waktu yang disediakan untuk bekerja bertambah sehubungan dengan pertambahan tingkat upah. Sesudah mencapai jumlah jam kerja  $HD$  jam, seseorang akan mengurangi jam kerjanya bila tingkat upah naik. Penurunan jam kerja sehubungan pertambahan tingkat upah (grafik  $S_2S_3$ ) dinamakan *Backward Bending Supply Curve*.

*Backward Bending Supply Curve* atau kurva tenaga kerja yang membalik hanya dapat terjadi pada penawaran tenaga kerja yang bersifat perorangan. Hal ini berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih luas, semakin tingginya tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah yang rendah akan

bersedia untuk bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih tinggi (Mahendra, 2014).

#### 2.1.5 Pasar Tenaga Kerja

Pasar kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif diantara orang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut (Sudarsono, 1990:147). Pasar kerja merupakan seluruh aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, yaitu pengusaha atau produsen, pencari kerja, perantara atau pihak ketiga dimana terdapat kemudahan bagi kedua pihak untuk saling berhubungan. Pihak ketiga bisa pemerintah, lembaga informal atau formal, konsultan, dan badan swasta. Sedangkan menurut Simanjuntak (2001: 101), pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja.

Menurut Suroto (1992: 193) masalah dalam pasar kerja pada dasarnya dapat disebut sebagai ketidakseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan dapat digolongkan dalam 4 kelompok yaitu:

- 1) Masalah kelebihan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja lebih besar daripada kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat.
- 2) Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja daripada kebutuhan.
- 3) Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat, akan tetapi nyatanya karena adanya suatu rintangan, keduanya tidak bertemu pada tempat waktu yang sama. Disini masalahnya terletak dalam mekanisme penyalurannya.

Pasar tenaga kerja dapat diartikan juga sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah pencari kerja (pemilik tenaga kerja), sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan pertemuan antara pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan dapat memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah.

#### 2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Kegiatan pemerintahan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan umum bagi masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijaksanaan perekonomian dengan negara lainnya. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak (Susanti, 1995:69). Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu :

##### a. Pengeluaran Rutin Pemerintah

Merupakan pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, yang termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain belanja pegawai, belanja barang, subsidi di daerah otonom, bunga, cicilan utang, dan lain-lainnya. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

#### b. Pengeluaran Pembangunan

Merupakan pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan pembelian kendaraan, maupun untuk pembangunan non fisik spiritual misalnya seperti penataran, pelatihan dan sebagainya. Selain membiayai pengeluaran sektoral melalui lembaga-lembaga, pengeluaran pembangunan juga membiayai proyek-proyek khusus daerah yang dikenal sebagai proyek inpres (Instruktur Presiden), baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun masing-masing daerah. Besarnya alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan keuangan Negara serta beberapa faktor-faktor yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Pada intinya pengeluaran pemerintah tersebut mengakibatkan pertumbuhan pada sektor industri sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Dengan demikian proyek-proyek yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, sejalan dengan pembangunan di daerah lain.

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh perbelanjaan agregat. Pada umumnya perbelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat *full employment*. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian *full employment*. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak (Mankiw, 2007).



### 2.1.7 Teori Upah

Malthus dan John Stuart Mills merupakan tokoh klasik yang mempunyai kesan pesimisme terhadap tingkat upah yang hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Malthus berpendapat apabila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah tetapi dengan berkurangnya jumlah penduduk justru akan mengangkat tingkat upah ke atas ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula. Sama halnya dengan John Stuart Mills yang menyebutkan pada saat investasi sudah dilakukan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi, tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut.

Pembaharuan teori upah dilakukan oleh sebagian kelompok mazhab neoklasik yang mencoba untuk menghilangkan sikap pesimisme. Dan beranggapan bahwa tingkat upah dapat saja tinggi asal sesuai dengan produk marginalnya. Menurut mazhab ini, tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal dan kemungkinan tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen karena tingkat upah juga tidak sama untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah. Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktivitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang terdapat dalam diri tenaga kerja. Semakin banyak modal yang dimiliki maka semakin tinggi kualitasnya. Modal yang dimaksud terdiri atas pendidikan pelatihan, pengalaman kerja, dan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 30 menyebutkan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa kerja yang

diberikannya bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau sebagian dalam bentuk uang dan sebagian dalam bentuk natura. Dalam penelitian ini digunakan upah minimum untuk mengetahui bagaimana upah memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Selanjutnya upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks di Indonesia, mengharuskan pemerintah mengatur upah minimum.

Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring naiknya upah nominal kesejahteraan (upah riil). Kenaikan tinggi upah minimum provinsi menyebabkan dilema bagi perusahaan, karena disatu sisi harus mematuhi peraturan pengupahan yang telah diatur oleh pemerintah, namun disisi lain permasalahan *labor cost* dirasakan menjadi berat terutama bagi industri padat karya dan industri kecil menengah.

Upah minimum memiliki efek buruk pada pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran, ketika undang-undang upah minimum diberlakukan, pengangguran akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena upah menjadi mahal daripada apa yang telah mereka anggarkan sebelumnya (C.Campbell, 2015). Undang-undang upah minimum juga mengurangi ketersediaan lapangan kerja dan hal ini menjadi kontradiksi dari tujuan undang-undang upah upah minimum (Swope, 2015).

Menurut Sholeh (2007) kebijakan upah minimum adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada

tingkat pendapatan “*living wage*”, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang memiliki kemampuan yang kurang mumpuni. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional. Menurut Suparmoko (2007) di Indonesia sendiri pemerintah ikut serta dalam mengatur hal penetapan tingkat upah. Pemerintah menetapkan tingkat upah minimum yang harus dibayar oleh perusahaan. Besarnya upah minimum untuk setiap daerah berbeda-beda karena biaya hidup di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Tinggi rendahnya biaya hidup ini dapat diketahui dengan melihat indeks biaya hidup (*costs of living indeks*) atau tingkat inflasi setiap daerah.

#### 2.1.8 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih mengarah kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final*

*goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara, yang diukur melalui presentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dalam banyak studi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara kerap di indikasikan oleh angka total pendapatan *Gross Domestic Bruto* (GDP) atau PDB. Secara nyata, pertumbuhan ekonomi menimbulkan efek penting yaitu (a) kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat, (b) menciptakan kesempatan kerja bagi jumlah penduduk yang semakin bertambah (Sukirno, 2006:421).

#### A. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan memengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah

penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

#### B. Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hamper pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y = C + I$ ). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = K = n$$

Dimana :

$g$  : Growth (tingkat pertumbuhan output)

$K$  : Capital (tingkat pertumbuhan modal)

$n$  : Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

### C. Pertumbuhan Neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsure pertumbuhan penduduk, akumulasi *capital*, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar modal ( $K$ ) dan tenaga kerja ( $L$ ). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-*output* dan rasio modal tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau memengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknis, sehingga produktivitas *capital* meningkat.

Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dan waktu. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisa lanjutan dari

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian determinan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu :

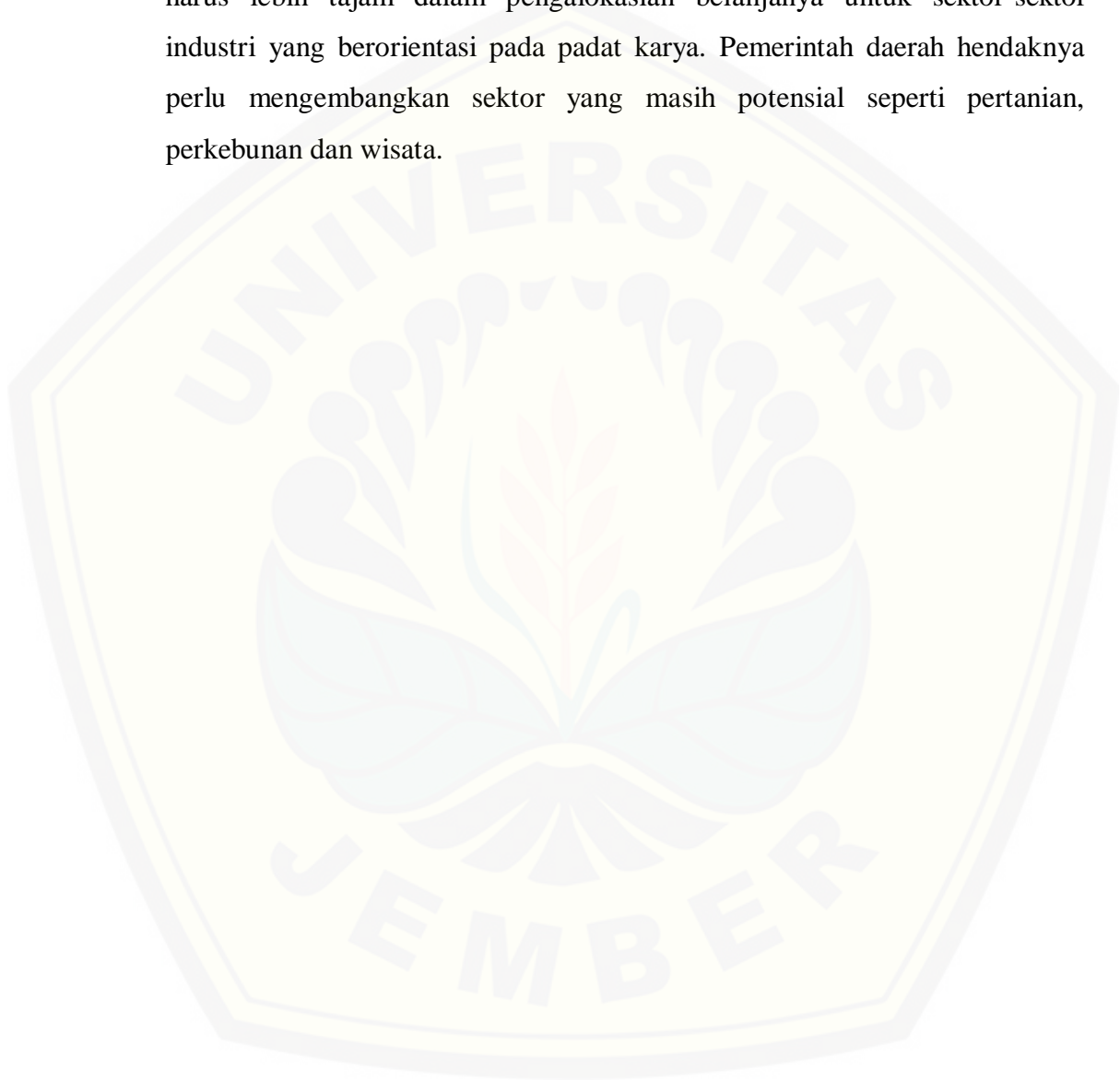
1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PDRB mengalami kenaikan maka akan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya.
2. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila UMR mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (G) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini maka saran yang direkomendasikan yaitu :

1. Hendaknya pemerintah daerah menyusun kebijakan pengupahan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga kebijakan pengupahan akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak.
2. Pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan produk domestik regional bruto disetiap sektor ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.
3. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah dari penggunaan anggaran belanja pembangunan. Pemerintah

daerah harus lebih bijaksana dalam memprioritaskan pembangunan daerahnya, terutama untuk dapat memberikan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan serta pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata. Agar dapat lebih memperluas lapangan kerja pemerintah daerah harus lebih tajam dalam pengalokasian belanjanya untuk sektor-sektor industri yang berorientasi pada padat karya. Pemerintah daerah hendaknya perlu mengembangkan sektor yang masih potensial seperti pertanian, perkebunan dan wisata.





**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Abipraja, Soedjono, 2002. *Perencanaan pembangunan di Indonesia : konsep, model, kebijaksanaan, instrumen serta strategi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Abdullahi, Idris Isyaku. 2016. Does Peverty Influence Prevalence if Child Labor in Developing Countries?. *Jurnal Internasional*. Malaysia : University Putra Malaysia
- Ananta, A. 1993. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arfida, B.R. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Arfida, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Bada Pusat Statistik. 2016. *Jawa Timur dalam angka 2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia 2011-2015*. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Jawa Timur dalam angka 2012*. Surabaya: Badan Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Jawa Timur Dalam Angka 2015*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Bellante, Don dan Mark Jackson, 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Boediono, 1999. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Budi Utami, Turminijanti. 2009. “*Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Dosmetik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember*”. Tesis. Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jember.

- Choi, Chang kon. 2007. *The Employment Effect of Economic Growth: Identifying Determinants of Employment Elasticity*. Chonbuk International University. South Korea
- Casares, Enrique. R. 2007. Productivity, Structural Change in Employment and Economic Growth. *Estudios Economicos*. Vol. 22, No.22. p.335-355.
- Dornbusch, R., S. Fischer, dan R. Startz. 1991. *Makroekonomi. Edisi Keempat*. J. Mulyadi (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Dumairy, 1999. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Erlangga.
- Dimas. Nenek Woyanti. 2009. “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16 No. 1. Hal. 32-41.
- Dimas. Nenek Woyanti. 2009. “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16 No. 1. Hal. 32-41.
- Danang Pratomo. 2011 “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Karasidenan Surakarta Tahun 2000-2008”. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Elnopembri. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 1990-2004. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Gary, S. Becker. 1997. *The Economics Approach to Human Behavior*. Links to chapter previews. University of Chacago Press.
- Gujarati, D. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar dan Porter, Dawn. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Jilid 1*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Handoko, Hani. 1985. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Haryo Kuncoro. 2013. “Upah Sistem Bagi Hasil & Penyerapan Tenaga Kerja”. Universitas Islam Indonesia.
- Irawan dan Suparmoko, 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPF.
- Indradewa, Gusti Agung & Ketut Suardhika Natha. 2015. “Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”. (Skripsi) Universitas Udayana (Uhud), Bali.

- Irwan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Ed 6. Jakarta: BPFE UGM
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mahendra, Adya Dwi. 2014. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi ke-6. Jakarta: Erlangga.
- Maimun, Sholeh. "Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia". Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mankiw N, Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurwaman, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006, 195.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi ke-6. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.G. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Machin, S. and Manning, A. 1994. "The Effects of Minimum Wages on Wage Dispersion and Employment: Evidence from The UK Wages Council". *Industrial and Labor Relations Review*, 47(2), 319-329.
- Manning, A. 2003. *Monopsony in Motion*. Princeton: Princeton University Press.
- Mulyadi. S. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- M. Taufik Zamrowi. 2007. "Pengaruh Struktur Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil (Studi di Industri Mebel di Jawa Tengah)". *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Meilia Lavianty. 2016. "Pengaruh PDRB, Investasi, Upah, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008-2013". Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
- Nilasari, L. 2007. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Barat studi kasus tahun 1986-2005" (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta.
- Pratomo, D. S. dan Adi Saputra, P. M. 2011. *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkadil: Tinjauan UUD 1945*. Fakultas

- Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya. *Journal of Indonesian Applied Economisc*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 269-285
- Sadono, Sukirno. 2011. Pengantar Teori Makro. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Sukirno Sadono. 2004. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2007. *Pengaruh Upah Riil Terhadap Penyerapan tenaga kerja*. Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia Pada [eprints.undip.ac.id.1680/1/Subekti.pdf](http://eprints.undip.ac.id.1680/1/Subekti.pdf)
- Sudarsono, 1990. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. LP3S. Jakarta.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: UGM Press.
- Susanti. 1995. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah*” (tesis). Yogyakarta: UGM.
- Suparmoko, dan Maria R Suparmoko. 2007. “*Ekonomi Lingkungan*”. Yogyakarta: BPEP
- Sumarsono, Sony. 2003. “*Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*”. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono. 1998. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, P. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi UI.
- Sudarsono.1995 *teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: LP3ES.
- Sukirno, S. 2000. *Teori Pengantar Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Bandung: Salemba Empat.
- Siregar, Hermanto dan Sukwika, Tatan. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor. *Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness*. Vol 7 No. 3. Universitas Udayana
- Susanti. 1995. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Propinsi Jawa Tengah” (*tesis*). Yogyakarta: UGM
- Sutomo, Ignatia, Rohana, Sitanggung, dan Nuchrowi. 2004. “*Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia.
- Sasana, Hadi. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Bisnis Ekonomi (JEB), Maret 2009, Hal. 50 – 69 Vol. 16, No.1. ISSN: 1412-3126. Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Todaro, Michael P., 2000a, *Economisc Development*, Seventh Edition, Addison Wesley, England
- Todaro, M.P. 2006.*Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.

**LAMPIRAN A****Data Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, UMR, Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015**

Wilayah/tahun	Penyerapan TK (%)	PDRB (Miliar Rupiah)	PDRB (Rp)	UMR (Rp)	G (Rp)	
Kab Pacitan 2011	1,54	7.246,2	1000000000	7,246,200,000,000.00	1,409,399	570,148,800,482.40
2012	1,02	7.705,0	1000000000	7,705,000,000,000.00	1,250,320	964.961.884.972,05
2013	0,99	8.157,6	1000000000	8,157,600,000,000.00	1,400,093	312,524,900,154.94
2014	1,08	8.582,2	1000000000	8,582,200,000,000.00	1,670,442	1,202,651,576,765.69
2015	0,97	9.019,5	1000000000	9,019,500,000,000.00	1,198,246	487,303,534,871.99
Kab Ponorogo 2011	6,79	9.472,2	1000000000	9,472,200,000,000.00	1,498,137	1,060,791,710,350.14
2012	3,34	10.038,4	1000000000	10,038,400,000,000.00	1,521,308	1,265,059,005,035.88
2013	3,25	10.554,5	1000000000	10,554,500,000,000.00	1,604,986	1,396,914,654,794.00
2014	3,66	11.104,1	1000000000	11,104,100,000,000.00	1,501,542	1,626,511,374,280.00
2015	3,68	11.686,2	1000000000	11,686,200,000,000.00	1,411,937	1,894,974,865,710.86
Kab Trenggalek 2011	3,27	8.435,2	1000000000	8,435,200,000,000.00	1,159,641	935,917,000,000.00
2012	2,98	8.959,5	1000000000	8,959,500,000,000.00	1,220,417	1,041,202,000,000.00
2013	4,04	9.496,7	1000000000	9,496,700,000,000.00	1,352,547	1,161,536,000,000.00
2014	4,20	9.998,4	1000000000	9,998,400,000,000.00	1,293,381	1,365,575,000,000.00
2015	2,46	10.500,8	1000000000	10,500,800,000,000.00	1,056,403	1,546,528,000,000.00
Kab Tulungagung 2011	3,56	17.845,2	1000000000	17,845,200,000,000.00	975,608	460,749,868,864.56
2012	3,10	18.999,0	1000000000	18,999,000,000,000.00	1,098,057	785,137,452,739.89
2013	2,71	20.164,3	1000000000	20,164,300,000,000.00	1,234,013	1,680,332,359,803.95
2014	2,42	21.265,2	1000000000	21,265,200,000,000.00	1,009,183	2,046,805,679,449.57
2015	3,95	22.326,6	1000000000	22,326,600,000,000.00	1,301,805	2,241,739,501,183.95
Kab Blitar 2011	3,91	17.093,9	1000000000	17,093,900,000,000.00	874,378	1.158.439.060.182,48
2012	2,82	18.054,5	1000000000	18,054,500,000,000.00	885,121	1.372.246.729.995,47
2013	3,64	18.967,3	1000000000	18,967,300,000,000.00	1,132,315	1,637,252,053,174.00
2014	3,08	19.920,2	1000000000	19,920,200,000,000.00	1,148,410	1,803,200,913,471.44
2015	2,79	20.925,5	1000000000	20,925,500,000,000.00	1,195,167	2,072,628,708,227.98
Kab Kediri 2011	8,33	19.354,9	1000000000	19,354,900,000,000.00	1,135,573	1.334.259.710.698,67
2012	4,08	20.538,3	1000000000	20,538,300,000,000.00	1,134,409	1.487.722.535.321,77
2013	4,65	21.733,5	1000000000	21,733,500,000,000.00	1,404,240	1,595,444,481,821.28

	2014	4,91	22.889,3	1000000000	22,889,300,000,000.00	1,288,162	2,072,628,708,227.98
	2015	5,02	24.005,5	1000000000	24,005,500,000,000.00	1,263,646	
Kab Malang 2011		5,51	44.091,3	1000000000	44,091,300,000,000.00	1,165,508	1.925.879.421.304,18
	2012	3,75	47.076,0	1000000000	47,076,000,000,000.00	1,196,084	2.221.707.105.580,75
	2013	5,17	49.571,7	1000000000	49,571,700,000,000.00	1,183,584	2,440,509,395,392.07
	2014	4,83	52.549,6	1000000000	52,549,600,000,000.00	1,211,987	2,864,314,173,736.17
	2015	4,95	55.316,3	1000000000	55,316,300,000,000.00	1,247,118	3,037836,154,902.82
Kab Lumajang 2011		3,16	15.144,4	1000000000	15,144,400,000,000.00	954,676	521,482,976,338.45
	2012	4,60	16.053,4	1000000000	16,053,400,000,000.00	908,463	765,756,405,775.57
	2013	2,01	16.949,6	1000000000	16,949,600,000,000.00	1,141,207	1,004,590,438,285.73
	2014	2,83	17.852,1	1000000000	17,852,100,000,000.00	1,024,381	1,259,737,617,403.59
	2015	2,60	18.677,7	1000000000	18,677,700,000,000.00	918,805	1,660,465,122,739.29
Kab Jember 2011		3,34	35.208,2	1000000000	35,208,200,000,000.00	712,829	1,784,833,475,920.00
	2012	3,77	37.262,0	1000000000	37,262,000,000,000.00	904,186	2,087,832,260,019.00
	2013	3,94	39.519,2	1000000000	39,519,200,000,000.00	983,390	2,244,493,056,590.00
	2014	4,64	41.968,8	1000000000	41,968,800,000,000.00	945,869	2,695,900,650,000.00
	2015	4,77	44.204,1	1000000000	44,204,100,000,000.00	1,007,079	3,083,637,990,000.00
Kab Banyuwangi 2011		6,06	34.720,4	1000000000	34,720,400,000,000.00	1,053,490	1,443,020,000,000.00
	2012	3,41	37.235,7	1000000000	37,235,700,000,000.00	994,442	1,683,010,000,000.00
	2013	4,65	39.733,6	1000000000	39,733,600,000,000.00	977,505	1,886,310,000,000.00
	2014	7,17	41.997,6	1000000000	41,997,600,000,000.00	1,257,888	2,229,160,000,000.00
	2015	2,55	44.523,5	1000000000	44,523,500,000,000.00	1,207,374	2,740,990,000,000.00
Kab Bondowoso 2011		3,01	9.033,0	1000000000	9,033,000,000,000.00	926,592	950.958.157.445,49
	2012	3,60	9.538,4	1000000000	9,538,400,000,000.00	1,154,548	1.074.126.371.921,77
	2013	2,04	10.140,1	1000000000	10,140,100,000,000.00	1,169,120	1,266,305,195,495.25
	2014	3,72	10.651,9	1000000000	10,651,900,000,000.00	1,180,781	1,471,104,168,997.53
	2015	1,75	11.178,7	1000000000	11,178,700,000,000.00	1,177,920	1,776,098,167,402.67
Kab Situbondo 2011		4,77	8.927,1	1000000000	8,927,100,000,000.00	867,608	838.589.264.436,03
	2012	3,33	9.411,6	1000000000	9,411,600,000,000.00	890,689	927.268.554.210,69
	2013	3,01	9.993,8	1000000000	9,993,800,000,000.00	1,156,904	1,150,103,067,652.69
	2014	4,15	10.572,4	1000000000	10,572,400,000,000.00	1,247,344	1,305,647,017,406.14
	2015	3,57	11.178,7	1000000000	11,178,700,000,000.00	948,439	1,570,497,249,258.39
Kab Probolinggo 2011		2,80	15.912,5	1000000000	15,912,500,000,000.00	1,045,809	913,237,425,000.00

	2012	1,92	16.936,8	1000000000	16,936,800,000,000.00	1,354,463	1,290,406,987,331.08
	2013	3,30	17.808,9	1000000000	17,808,900,000,000.00	1,427,047	1,329,410,577,151.51
	2014	1,47	18.681,3	1000000000	18,681,300,000,000.00	1,385,743	1,524,038,393,411.72
	2015	2,51	19.570,4	1000000000	19,570,400,000,000.00	1,258,387	1,879,876,712,131.81
Kab Pasuruan 2011		4,30	65.271,6	1000000000	65,271,600,000,000.00	1,055,062	1.342.290.883.844,07
	2012	6,38	70.167,1	1000000000	70,167,100,000,000.00	1,197,171	1.563.955.540.711,43
	2013	4,34	75.044,0	1000000000	75,044,000,000,000.00	1,332,406	1,848,720,184,268.90
	2014	4,43	80.105,3	1000000000	80,105,300,000,000.00	1,433,725	2,000,780,721,322.78
	2015	6,41	84.412,0	1000000000	84,412,000,000,000.00	1,607,026	2,443,728,058,572.62
Kab Sidoarjo 2011		8,65	87.212,4	1000000000	87,212,400,000,000.00	1,387,313	1.857.374.114.186,70
	2012	5,37	93.543,9	1000000000	93,543,900,000,000.00	1,661,293	2.270.802.911.317,37
	2013	4,12	99.992,5	1000000000	99,992,500,000,000.00	2,023,986	2,597,052,971,823.38
	2014	3,88	106.435,5	1000000000	106,435,500,000,000.00	2,433,187	3,020,245,632,633.01
	2015	6,30	112.012,5	1000000000	112,012,500,000,000.00	2,402,298	3,668,459,290,487.61
Kab Mojokerto 2011		6,79	36.405,8	1000000000	36,405,800,000,000.00	1,079,941	733,587,249,239.65
	2012	3,35	39.047,3	1000000000	39,047,300,000,000.00	1,345,440	878,036,931,684.67
	2013	3,16	41.608,4	1000000000	41,608,400,000,000.00	1,454,225	1,046,219,058,310.45
	2014	3,81	44.292,1	1000000000	44,292,100,000,000.00	1,615,005	1,276,663,551,518.08
	2015	4,05	46.792,8	1000000000	46,792,800,000,000.00	1,761,486	1,143,438,346,873.62
Kab Jombang 2011		6,58	18.385,0	1000000000	18,385,000,000,000.00	1,039,166	1,143,438,346,873.62
	2012	6,72	19.514,8	1000000000	19,514,800,000,000.00	1,249,664	1,097,440,900,177.27
	2013	5,59	20.672,3	1000000000	20,672,300,000,000.00	1,407,811	1,480,249,329,086.33
	2014	4,39	21.793,2	1000000000	21,793,200,000,000.00	1,506,509	1,280,490,368,792.93
	2015	6,11	22.960,2	1000000000	22,960,200,000,000.00	1,737,968	2,164,953,026,633.20
Kab Nganjuk 2011		6,31	12.061,2	1000000000	12,061,200,000,000.00	1,165,128	1,127,221,990,873.38
	2012	4,09	12.767,0	1000000000	12,767,000,000,000.00	1,471,102	1,348,823,759,624.08
	2013	4,73	13.456,0	1000000000	13,456,000,000,000.00	1,526,864	1,486,896,745,684.16
	2014	3,93	14.142,6	1000000000	14,142,600,000,000.00	1,873,558	1,736,787,185,571.56
	2015	2,10	14.875,7	1000000000	14,875,700,000,000.00	1,223,948	1,983,727,931,370.27
Kab Madiun 2011		4,96	8.608,7	1000000000	8,608,700,000,000.00	1,329,482	970,158,501,962.11
	2012	3,99	9.135,7	1000000000	9,135,700,000,000.00	1,387,746	1,126,446,333,563.37
	2013	4,63	9.654,1	1000000000	9,654,100,000,000.00	1,514,112	1,275,824,633,930.50
	2014	3,38	10.169,7	1000000000	10,169,700,000,000.00	1,620,418	1,044,107,733,041.05



	2015	6,99	10.705,1	1000000000	10,705,100,000,000.00	1,550,334	1,837,157,447,167.35
Kab Magetan 2011		3,95	8.744,8	1000000000	8,744,800,000,000.00	1,711,384	960.378.705.229,65
	2012	3,64	9.251,2	1000000000	9,251,200,000,000.00	1,591,085	1.064.653.962.946,00
	2013	2,96	9.792,6	1000000000	9,792,600,000,000.00	1,778,370	1,340,641,003,570.06
	2014	4,28	10.292,4	1000000000	10,292,400,000,000.00	1,731,968	1,618,869,795,765.84
	2015	6,05	10.824,1	1000000000	10,824,100,000,000.00	1,979,090	1,589,421,037,874.09
Kab Ngawi 2011		5,10	8.973,3	1000000000	8,973,300,000,000.00	1,409,934	1,078,529,104,903.00
	2012	2,94	9.568,2	1000000000	9,568,200,000,000.00	1,295,746	1,170,044,264,780.00
	2013	4,97	10.094,0	1000000000	10,094,000,000,000.00	1,446,375	1,355,327,215,000.00
	2014	5,61	10.681,0	1000000000	10,681,000,000,000.00	1,643,734	1,585,266,460,840.00
	2015	3,99	11.224,0	1000000000	11,224,000,000,000.00	1,830,873	1,836,690,671,900.00
Kab Bojonegoro 2011		5,70	36.751,0	1000000000	36,751,000,000,000.00	1,150,781	1,288,224,271,897.05
	2012	3,42	38.136,1	1000000000	38,136,100,000,000.00	1,375,541	1,693,112,375,766.76
	2013	5,81	39.039,4	1000000000	39,039,400,000,000.00	1,444,924	2,034,120,195,583.97
	2014	3,21	39.934,4	1000000000	39,934,400,000,000.00	1,230,647	2,416,229,249,525.76
	2015	5,01	46.892,2	1000000000	46,892,200,000,000.00	1,688,996	2,844,471,918,138.95
Kab Tuban 2011		3,69	29.934,3	1000000000	29,934,300,000,000.00	1,054,172	1,080,325,975,448.56
	2012	4,13	31.816,3	1000000000	31,816,300,000,000.00	1,105,475	1.379.033.039.582,38
	2013	4,30	33.678,8	1000000000	33,678,800,000,000.00	1,346,604	1,489,827,940,912.12
	2014	3,63	35.519,4	1000000000	35,519,400,000,000.00	1,131,404	1,768,024,608,472.09
	2015	3,03	37.254,7	1000000000	37,254,700,000,000.00	1,197,506	2,044,904,661,890.59
Kab Lamongan 2011		6,14	17.360,5	1000000000	17,360,500,000,000.00	1,221,260	1,045,904,661,890.59
	2012	4,75	18.562,7	1000000000	18,562,700,000,000.00	1,202,786	1,473,747,394,873.11
	2013	4,93	19.848,8	1000000000	19,848,800,000,000.00	1,218,625	1,689,560,221,379.53
	2014	4,30	21.100,1	1000000000	21,100,100,000,000.00	1,173,081	1,913,817,056,084.09
	2015	4,10	22.316,8	1000000000	22,316,800,000,000.00	1,507,459	2,407,389,245,871.14
Kab Gresik 2011		5,93	62.898,7	1000000000	62,898,700,000,000.00	1,480,812	428,053,009,084.00
	2012	6,78	67.248,8	1000000000	67,248,800,000,000.00	1,609,229	527,038,521,748.00
	2013	4,55	71.314,2	1000000000	71,314,200,000,000.00	1,950,360	904,554,607,907.00
	2014	5,06	76.336,7	1000000000	76,336,700,000,000.00	2,100,462	1,257,796,437,589.51
	2015	5,67	81.359,4	1000000000	81,359,400,000,000.00	2,507,632	1,183,918,120,828.17
Kab Bangkalan 2011		6,37	16.406,5	1000000000	16,406,500,000,000.00	1,070,932	526,015,570,408.00
	2012	5,13	16.173,7	1000000000	16,173,700,000,000.00	1,555,587	539,396,421,374.00

	2013	6,78	16.204,0	1000000000	16,204,000,000,000.00	1,554,990	705,256,177,155.00
	2014	5,68	17.369,8	1000000000	17,369,800,000,000.00	1,577,047	775,683,771,692.00
	2015	5,00	16.907,1	1000000000	16,907,100,000,000.00	1,379,462	863,354,882,576.00
Kab Sampang 2011		2,13	10.315,3	1000000000	10,315,300,000,000.00	757,037	870,885,401,897.18
	2012	1,71	10.910,9	1000000000	10,910,900,000,000.00	949,576	991,977,140,056.17
	2013	4,68	11.623,8	1000000000	11,623,800,000,000.00	961,599	1,085,328,587,395.12
	2014	2,22	11.632,9	1000000000	11,632,900,000,000.00	907,918	1,273,260,757,435.00
	2015	2,51	11.874,5	1000000000	11,874,500,000,000.00	1,122,769	1,704,171,539,547.48
Kab Pamekasan 2011		2,61	7.429,4	1000000000	7,429,400,000,000.00	1,315,694	925,917,999,266.69
	2012	2,29	7.894,0	1000000000	7,894,000,000,000.00	1,201,371	
	2013	2,17	8.375,2	1000000000	8,375,200,000,000.00	1,331,849	
	2014	2,14	8.846,2	1000000000	8,846,200,000,000.00	1,217,472	
	2015	4,26	9.317,2	1000000000	9,317,200,000,000.00	1,243,606	
Kab Sumenep 2011		1,99	16.064,8	1000000000	16,064,800,000,000.00	1,565,013	
	2012	1,14	17.665,0	1000000000	17,665,000,000,000.00	1,308,844	
	2013	2,56	20.218,1	1000000000	20,218,100,000,000.00	1,502,261	
	2014	1,01	21.476,8	1000000000	21,476,800,000,000.00	864,861	
	2015	2,07	21.750,5	1000000000	21,750,500,000,000.00	851,582	
Kota Kediri 2011		9,69	60.020,1	1000000000	60,020,100,000,000.00	1,253,576	721.685.076.250,28
	2012	8,12	63.185,1	1000000000	63,185,100,000,000.00	1,601,720	884,348,331,889.48
	2013	7,92	65.408,8	1000000000	65,408,800,000,000.00	1,622,519	1,033,157,944,334.89
	2014	7,66	69.232,9	1000000000	69,232,900,000,000.00	1,498,260	1,122,732,501,378.45
	2015	8,46	72.945,5	1000000000	72,945,500,000,000.00	1,605,830	1,146,239,190,481.78
Kota Blitar 2011		5,24	3.038,4	1000000000	3,038,400,000,000.00	1,393,718	561,738,908,000.00
	2012	3,68	3.236,6	1000000000	3,236,600,000,000.00	1,545,372	549,025,337,000.00
	2013	6,17	3.446,8	1000000000	3,446,800,000,000.00	1,696,530	667,043,281,000.00
	2014	5,71	3.649,5	1000000000	3,649,500,000,000.00	2,010,864	709,571,458,000.00
	2015	3,80	3.857,0	1000000000	3,857,000,000,000.00	2,081,554	782,148,793,000.00
Kota Malang 2011		9,74	33.273,7	1000000000	33,273,700,000,000.00	1,504,350	629,046,895,640.00
	2012	7,96	35.355,7	1000000000	35,355,700,000,000.00	1,525,956	648,419,281,070.00
	2013	7,73	37.547,7	1000000000	37,547,700,000,000.00	1,893,817	749,227,876,160.00
	2014	7,22	39.724,3	1000000000	39,724,300,000,000.00	1,344,869	845,115,877,230.00
	2015	7,28	41.951,6	1000000000	41,951,600,000,000.00	1,991,809	893,714,312,490.00

Kota Probolinggo 2011	5,46	5.213,9	1000000000	5,213,900,000,000.00	1,575,361	603,859,454,170.00
2012	5,26	5.552,1	1000000000	5,552,100,000,000.00	1,734,530	611,170,952,840.00
2013	4,48	5.911,3	1000000000	5,911,300,000,000.00	1,804,684	655,932,038,460.00
2014	5,16	6.261,9	1000000000	6,261,900,000,000.00	2,374,008	778,680,159,850.00
2015	4,01	6.629,1	1000000000	6,629,100,000,000.00	1,940,982	731,680,159,850.00
Kota Pasuruan 2011	6,22	3.810,7	1000000000	3,810,700,000,000.00	1,240,094	459,290,263,800.00
2012	4,54	4.051,2	1000000000	4,051,200,000,000.00	1,481,596	487,917,639,000.00
2013	5,41	4.315,1	1000000000	4,315,100,000,000.00	1,921,726	552,338,978,000.00
2014	6,09	4.561,1	1000000000	4,561,100,000,000.00	1,888,852	636,266,484,000.00
2015	5,57	4.813,3	1000000000	4,813,300,000,000.00	1,751,459	741,224,066,000.00
Kota Mojokerto 2011	10,59	3.165,6	1000000000	3,165,600,000,000.00	1,155,291	345,476,477,070.00
2012	7,52	3.358,4	1000000000	3,358,400,000,000.00	1,221,446	488,945,505,896,11
2013	5,73	3.366,7	1000000000	3,366,700,000,000.00	1,644,872	511,091,545,446.13
2014	4,42	3.774,5	1000000000	3,774,500,000,000.00	2,125,413	631,979,414,509.86
2015	4,88	3.991,1	1000000000	3,991,100,000,000.00	2,105,254	706,783,751,688.70
Kota Madiun 2011	10,62	6.494,4	1000000000	6,494,400,000,000.00	1,229,994	526,846,072,000.00
2012	6,89	6.937,7	1000000000	6,937,700,000,000.00	1,366,642	610,542,092,000.00
2013	6,57	7.470,7	1000000000	7,470,700,000,000.00	1,802,250	775,087,202,000.00
2014	6,93	7.965,5	1000000000	7,965,500,000,000.00	1,094,638	1,054,769,960,000.00
2015	5,10	8.455,4	1000000000	8,455,400,000,000.00	1,634,206	877,221,901,000.00
Kota Surabaya 2011	7,81	247.686,6	1000000000	247,686,600,000,000.00	1,578,365	1,242,832,712,106.80
2012	5,27	265.892,1	1000000000	265,892,100,000,000.00	1,418,652	2,430,904,524,411.44
2013	5,32	286.050,7	1000000000	286,050,700,000,000.00	1,716,755	3,112,358,043,032.11
2014	5,82	305.957,3	1000000000	305,957,300,000,000.00	1,867,678	3,591,670,191,734.00
2015	7,01	324.227,8	1000000000	324,227,800,000,000.00	2,197,552	3,591,670,191,734.00
Kota Batu 2011	4,82	6.968,0	1000000000	6,968,000,000,000.00	1,117,832	435,856,317,399,00
2012	3,51	7.473,6	1000000000	7,473,600,000,000.00	1,304,939	435,188,559,660.72
2013	2,30	8.018,6	1000000000	8,018,600,000,000.00	1,419,261	521,663,560,731.24
2014	2,43	8.572,1	1000000000	8,572,100,000,000.00	1,089,204	632,737,653,584.00
2015	4,29	9.145,9	1000000000	9,145,900,000,000.00	1,536,004	819,751,076,487.00

Sumber: BPS

## LAMPIRAN B

### Log Data Penelitian

Wilayah/tahun	Log PDRB	Log UMR	Log G
Kab Pacitan 2011	12.86011032	6.149033959	11.75598821
2012	12.88677264	6.097021178	11.98451016
2013	12.91156241	6.146156884	11.49488463
2014	12.93359863	6.222831401	12.08013983
2015	12.95518246	6.078545988	11.68779956
Kab Ponorogo 2011	12.97645086	6.17555153	12.02563012
2012	13.0016645	6.182217149	12.10211078
2013	13.02343766	6.205471248	12.14516987
2014	13.04548336	6.176537484	12.2112571
2015	13.06767331	6.149815319	12.27760345
Kab Trenggalek 2011	12.92609538	6.064323562	11.97123734
2012	12.95228377	6.086508249	12.01753499
2013	12.97757272	6.131152365	12.06503267
2014	12.99993051	6.111726477	12.13531556
2015	13.02122239	6.023829626	12.18935779
Kab Tulungagung 2011	13.25152142	5.989275353	11.66346522
2012	13.27873074	6.040624885	11.89494569
2013	13.30458315	6.091319735	12.22539519
2014	13.32766947	6.003969926	12.31107661
2015	13.34882259	6.114545935	12.35058514
Kab Blitar 2011	13.23284116	5.941699222	12.06387319
2012	13.25658547	5.947002645	12.1374322
2013	13.27800551	6.053967261	12.21411554
2014	13.29929369	6.060096966	12.25604412
2015	13.32067584	6.077428593	12.31652151
Kab Kediri 2011	13.28679093	6.055215058	12.12524037
2012	13.31256449	6.054769663	12.17252194
2013	13.33712967	6.14744134	12.2028817
2014	13.35963251	6.109970484	12.31652151
2015	13.38031076	6.101625427	12.37508793
Kab Malang 2011	13.6443529	6.066515259	12.28462909
2012	13.67279955	6.077761681	12.3466868
2013	13.69523381	6.073199086	12.38748048
2014	13.72056941	6.083497962	12.45702065
2015	13.74285312	6.095907548	12.48256435
Kab Lumajang 2011	13.18025207	5.979856005	11.71724014
2012	13.20556703	5.958307244	11.88409064
2013	13.22915945	6.057364427	12.00198904
2014	13.25168931	6.010461515	12.22022976
2015	13.2713234	5.96322335	12.22022976
Kab Jember 2011	13.54664382	5.85298536	12.2515977
2012	13.57126616	5.956257778	12.3196956
2013	13.59680814	5.992725788	12.35111827
2014	13.62292655	5.975830992	12.43070388
2015	13.64546255	6.00306354	12.48906339
Kab Banyuwangi 2011	13.54058472	6.022630418	12.15927235
2012	13.57095952	5.997579458	12.2260867
2013	13.59915792	5.990118988	12.27561307

	2014	13.62322447	6.099641974	12.3615692
	2015	13.6485893	6.081841819	12.43790745
Kab Bondowoso	2011	12.95583201	5.966888546	11.97816141
	2012	12.97947553	6.062411993	12.03105538
	2013	13.00604224	6.06785909	12.10253839
	2014	13.02742708	6.072169356	12.16764343
	2015	13.0483913	6.071115796	12.24946697
Kab Situbondo	2011	12.9507104	5.938323548	11.9235493
	2012	12.97366346	5.949726089	11.96720553
	2013	12.99973065	6.063297323	12.06073676
	2014	13.02417359	6.095986242	12.11582578
	2015	13.0483913	5.977009404	12.19603718
Kab Probolinggo	2011	13.20173842	6.019452375	11.9605837
	2012	13.22883136	6.131767146	12.11072671
	2013	13.2506371	6.154438277	12.12365913
	2014	13.27140709	6.141682693	12.18299591
	2015	13.2915997	6.099814223	12.27412937
Kab Pasuruan	2011	13.81472426	6.023277981	12.12784664
	2012	13.84613353	6.078156188	12.1942244
	2013	13.87531597	6.12463658	12.26687118
	2014	13.90366125	6.156465858	12.30119949
	2015	13.92640419	6.206022903	12.38805288
Kab Sidoarjo	2011	13.94057824	6.142174456	12.26889939
	2012	13.97101547	6.220446235	12.35617944
	2013	13.99996743	6.306207504	12.41448081
	2014	14.0270865	6.386175487	12.48004226
	2015	14.04926649	6.38062688	12.5644837
Kab Mojokerto	2011	13.56117058	6.033400029	11.86545177
	2012	13.59159101	6.128864335	11.94351278
	2013	13.61918102	6.162631606	12.01962282
	2014	13.64632627	6.208173871	11.99765678
	2015	13.67017903	6.245879196	12.10607646
Kab Jombang	2011	13.26446363	6.016684929	12.05821275
	2012	13.2903641	6.096793259	12.04038114
	2013	13.3153888	6.148544354	12.17033487
	2014	13.338321	6.177971731	12.10737632
	2015	13.36097567	6.240041776	12.33544848
Kab Nganjuk	2011	13.08139052	6.066373639	12.05200945
	2012	13.10608886	6.167642786	12.12995521
	2013	13.12891598	6.183800356	12.17228081
	2014	13.15052926	6.272667142	12.23974661
	2015	13.17247741	6.087762967	12.29748211
Kab Madiun	2011	12.93493757	6.123682462	11.98684269
	2012	12.96074183	6.142309984	12.05171051
	2013	12.98471179	6.180158001	12.10579098
	2014	13.00730814	6.209627059	12.01874531
	2015	13.02959073	6.190425272	12.26414638
Kab Magetan	2011	12.94174988	6.233347467	11.98244252
	2012	12.96619807	6.201693381	12.02720848
	2013	12.99089802	6.250022123	12.1273125
	2014	13.01251666	6.238539864	12.20921192
	2015	13.0343918	6.296465544	12.20123896
Kab Ngawi	2011	12.95295219	6.149198784	12.03283187

	2012	12.98083024	6.112519877	12.06820229
	2013	13.0040633	6.160280907	12.13204416
	2014	13.02861192	6.215831538	12.20010227
	2015	13.05014766	6.26265822	12.26403602
Kab Bojonegoro	2011	13.56526916	6.060992683	12.10999148
	2012	13.58133628	6.13847354	12.22868578
	2013	13.59150313	6.159845005	12.30837661
	2014	13.60134716	6.090133497	12.38313814
	2015	13.67110061	6.227628621	12.45400165
Kab Tuban	2011	13.47616911	6.022911477	12.03355482
	2012	13.50264967	6.043548926	12.13957467
	2013	13.52735661	6.1292399	12.17313611
	2014	13.55046562	6.05361771	12.24748831
	2015	13.57118107	6.078277698	12.31064888
Kab Lamongan	2011	13.23956223	6.086808133	12.0194921
	2012	13.26864115	6.080188364	12.16842305
	2013	13.29773426	6.085870083	12.28190042
	2014	13.32428451	6.069328001	12.28190042
	2015	13.34863192	6.178245509	12.38154632
Kab Gresik	2011	13.79864167	6.170499925	11.63149755
	2012	13.82768454	6.20661785	11.72184236
	2013	13.85317601	6.290114781	11.95643479
	2014	13.88273338	6.322314829	12.07332167
	2015	13.91040774	6.399263803	12.07332167
Kab Bangkalan	2011	13.21501594	6.029761896	11.7209986
	2012	13.20880938	6.191894305	11.73190806
	2013	13.20962223	6.1917276	11.8483469
	2014	13.23979482	6.197844637	11.88968471
	2015	13.22806912	6.139709741	11.93618935
Kab Sampang	2011	13.01348186	5.879117106	11.93996101
	2012	13.03786058	5.97752973	11.99650166
	2013	13.06534813	5.982994003	12.03556124
	2014	13.06568799	5.958046626	12.10491735
	2015	13.07461533	6.050290413	12.23151331
Kab Pamekasan	2011	12.87095374	6.119154894	11.96657253
	2012	12.89729712	6.079677144	
	2013	12.92299519	6.124454989	
	2014	12.94675675	6.085458982	
	2015	12.96928542	6.094682809	
Kab Sumenep	2011	13.20587532	6.194517949	
	2012	13.24711364	6.116887886	
	2013	13.30574034	6.176745393	
	2014	13.33196957	5.936946313	
	2015	13.33746924	5.930226473	
Kota Kediri	2011	13.77829671	6.098150669	11.85834772
	2012	13.80061468	6.204586598	11.73959239
	2013	13.81563618	6.210189791	12.01416672
	2014	13.84031252	6.175587185	12.05027525
	2015	13.86299851	6.205699567	12.05927525
Kota Blitar	2011	12.48264495	6.144174909	11.74953451
	2012	12.51008903	6.189033039	11.73959239
	2013	12.53741608	6.229561544	11.84215401
	2014	12.56223337	6.303382699	11.85099614

	2015	12.58624964	6.318387682	11.79868302
Kota Malang 2011		13.5221011	6.17734889	11.79868302
	2012	13.54845944	6.183542011	11.81185592
	2013	13.57458334	6.277338011	11.87461393
	2014	13.59905625	6.128679983	11.81185592
	2015	13.62274853	6.29924769	11.95119871
Kota Probolinggo 2011		12.7171627	6.19738009	11.78616271
	2012	12.74445728	6.239181816	11.81685884
	2013	12.771683	6.256401168	11.86432128
	2014	12.79670613	6.375482178	11.89102879
	2015	12.82145457	6.288021508	11.86432128
Kota Pasuruan 2011		12.58100476	6.093454606	11.66208724
	2012	12.60758368	6.170729797	11.68834652
	2013	12.63499086	6.283691466	11.74220569
	2014	12.65906959	6.27619793	11.80363905
	2015	12.68244293	6.243399975	11.86994951
Kota Mojokerto 2011		12.50045604	6.06269139	11.53841848
	2012	12.52613242	6.086874272	11.68926046
	2013	12.52720442	6.216132108	11.7084987
	2014	12.57685943	6.327443333	11.80070293
	2015	12.60109261	6.323304501	11.84928656
Kota Madiun 2011		12.81253903	6.089902993	11.72168375
	2012	12.84121552	6.135654763	11.78571561
	2013	12.8733613	6.255815034	11.88935057
	2014	12.90121304	6.03927052	12.02315775
	2015	12.92713416	6.213306801	11.94310947
Kota Surabaya 2011		14.39390251	6.198207442	12.09441268
	2012	14.42470543	6.151875875	12.3857679
	2013	14.45644301	6.234708321	12.49308955
	2014	14.48566082	6.271302003	12.55529645
	2015	14.51085025	6.34193916	12.58526571
Kota Batu 2011		12.84310814	6.048376538	11.63934335
	2012	12.87352985	6.115590211	11.63867747
	2013	12.90409855	6.152062269	11.7173905
	2014	12.93308723	6.037109228	11.80122368
	2015	12.96122645	6.186392347	11.913682

**LAMPIRAN C****Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	22.443304	3	0.0001

\*\* WARNING: estimated period random effects variance is zero.

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	0.000308	0.000387	0.000000	0.0000
UMR	5.978578	4.149814	0.166860	0.0000
G	0.829582	-0.440849	0.091484	0.0000

Period random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 03/02/18 Time: 09:13

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 31

Total panel (unbalanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.28611	12.03828	-3.512637	0.0006
PDRB	0.000308	0.000119	2.590003	0.0108
UMR	5.978578	1.235723	4.838122	0.0000
G	1.522707	0.693126	2.196869	0.0337

**Effects Specification**

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.279208	Mean dependent var	4.422188
Adjusted R-squared	0.237162	S.D. dependent var	1.838919
S.E. of regression	1.606123	Akaike info criterion	3.845985
Sum squared resid	309.5558	Schwarz criterion	4.024237
Log likelihood	-238.1431	Hannan-Quinn criter.	3.918410
F-statistic	6.640503	Durbin-Watson stat	0.980650
Prob(F-statistic)	0.000001		



**LAMPIRAN D**

## Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: TK  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 03/02/18 Time: 09:14  
 Sample: 2011 2015  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 31  
 Total panel (unbalanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.28611	12.03828	-3.512637	0.0006
PDRB	0.000308	0.000119	2.590003	0.0108
UMR	5.978578	1.235723	4.838122	0.0000
G	1.522707	0.693126	2.196869	0.0337

## Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.279208	Mean dependent var	4.422188
Adjusted R-squared	0.237162	S.D. dependent var	1.838919
S.E. of regression	1.606123	Akaike info criterion	3.845985
Sum squared resid	309.5558	Schwarz criterion	4.024237
Log likelihood	-238.1431	Hannan-Quinn criter.	3.918410
F-statistic	6.640503	Durbin-Watson stat	0.980650
Prob(F-statistic)	0.000001		

**LAMPIRAN E**

## Cross-section Effect

CROSSID	Effect
Pacitan	-1205.885
Ponorogo	-1201.720
Trenggalek	-1202.954
Tulungagung	-1199.853
Blitar	-1199.752
Kediri	-1197.010
Malang	-1193.731
Lumajang	-1200.461
Jember	-1195.392
Bondowoso	-1203.209
Situbondo	-1202.364
Probolinggo	-1200.923
Pasuruan	-1191.027
Sidoarjo	-1189.445
Mojokerto	-1196.230
Jombang	-1200.464
Nganjuk	-1201.515
Magetan	-1202.067
Ngawi	-1201.557
Bojonegoro	-1194.810
Tuban	-1196.212
Lamongan	-1198.260
Gresik	-1190.862
Bangkalan	-1197.759
Sampang	-1202.816
Pamengkasan	-1204.878
Sumenep	-1522.513
Kota Mojokerto	-1204.452
Kota Madiun	-1200.234
Kota Surabaya	-1184.103
Kota Batu	-1203.288

**LAMPIRAN F**

## B. Uji Multikolinieritas

	PDRB	UMR	G
PDRB	1.000000	-0.021077	-0.095009
UMR	-0.021077	1.000000	-0.001769
G	-0.095009	-0.001769	1.000000



**LAMPIRAN G**

## Uji Heterokedatisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 03/02/18 Time: 09:27

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 31

Total panel (unbalanced) observations: 128

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.61578	6.401291	3.064347	0.2027
PDRB	-0.000111	7.23E-05	-1.528320	0.1290
UMR	-0.341647	0.716750	-0.476661	0.6344
G	-1.350015	0.383280	-3.522272	0.1026
R-squared	0.101682	Mean dependent var		1.169481
Adjusted R-squared	0.079948	S.D. dependent var		1.029074
S.E. of regression	0.987081	Akaike info criterion		2.842622
Sum squared resid	120.8168	Schwarz criterion		2.931748
Log likelihood	-177.9278	Hannan-Quinn criter.		2.878834
F-statistic	4.678575	Durbin-Watson stat		1.371248
Prob(F-statistic)	0.003938			

**LAMPIRAN H****C. Uji Normalitas**